



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EMILYA NURJANI
2. Jabatan : KETUA PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI GEOGRAFI LINGKUNGAN
3. NHK : 947716

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.390.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 313 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN	Rp. 700.000.000	
2. Tanah Seluas 431 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI	Rp. 400.000.000	
3. Tanah Seluas 75 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI	Rp. 100.000.000	
4. Tanah Seluas 129 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI	Rp. 190.000.000	
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	162.500.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp. 7.000.000	
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp. 10.000.000	
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI	Rp. 15.500.000	
4. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp. 130.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	50.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	244.371.369



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 1.846.871.369

III. HUTANG

Rp. 1.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.845.871.369

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.